

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang di hadapi oleh seluruh dunia sampai pada abad 21 saat ini. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Oleh karena itu masalah kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Indonesia karena merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam merespon masalah ini, para pemimpin Negara di dunia menyepakati deklarasi yang disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDG's). Pemerintah Indonesia hadir untuk mendeklarasikan MDG's di bulan September tahun 2000 yang diikuti dengan 189 negara di dunia. Dalam deklarasi ini targetnya ialah meminimalkan penduduk miskin mencapai 50% memberi indikasi bahwasannya permasalahan kemiskinan yang ada ini menjadi fokus dunia.

Setelah konsep *Millenium Development Goals* (MDG's) berakhir pada tahun 2015, konsep tersebut diganti menjadi *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dihadirkan dengan tujuan untuk memenuhi tantangan masa depan dunia. SDG's tersebut berlaku selama 30 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2030. *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan kesepakatan dunia dan Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang meliputi 17 tujuan yang dalamnya terdapat target pertama dalam SDGs ini adalah tanpa kemiskinan dengan

cara mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di manapun.

Tujuan yang ingin dicapai pada program SDG's tersebut bersifat universal pada seluruh negara yang menganut, yang mana dengan hal tersebut mampu memberi keseimbangan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan ini, sebagai misalnya ialah dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Agar dapat menyeimbangkan ketiga dimensi ini, oleh karenanya SDG's mempunyai lima prinsip utamanya, di antaranya ialah perdamaian, kesejahteraan, dunia, manusia serta kemitraan yang berkeinginan untuk mencapai ketiga tujuan mulia ini tahun 2030 yang berbentuk dengan menuntaskan kemiskinan, mengatasi perubahan iklim serta mencapai kesetaraan. Kemiskinan ialah sebagai permasalahan utama dan penting, selain itu pencapaian yang lain.

Dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's), pemerintah Indonesia cukup serius hal tersebut termaktub pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDG's, yang sudah di tandatangani langsung oleh presiden Joko Widodo, Perpres ini di dalamnya berisi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang kemudian menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sebagai dokumen yang di dalamnya mencakup dengan sasaran dan tujuan global tahun 2016 – 2030 (AULIA, 2020).

Persoalan yang paling sulit terhadap berbagai Negara yang kurang berkembang dan sedang berkembang ini ialah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan ini masuk pada permasalahan yang sifatnya kemanusiaan. Dengan adanya persoalan kemiskinan tersebut memberikan dampak pada konsekuensi pertanggungjawaban moral untuk kebanyakan orang dalam mencermati kehidupan

orang lainnya dalam hal kemiskinan. Kemiskinan ini sendiri mencakup dalam suatu bentuk dari pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan bahwa keamanan manusia akan terancam yang disebabkan kemiskinan. Tidak dapat memperoleh makanan yang layak, tidak memperoleh kesehatan serta pendidikan yang layak ini ialah masuk dalam bentuk dari ancaman keamanan manusia.

Semua kebijakan serta program yang pemerintah berikan ini tentu mempunyai prioritas pokoknya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dengan tidak adanya partisipasi dari semua rakyat, dengan demikian cita-cita ini tidak akan pernah terwujud. Pemerintah dengan terdapatnya SDG's ini harapan besarnya ialah agar dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam semua bidang, baik itu bidang lingkungan hidup, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk kelangsungan hidup generasi untuk sekarang ini dan di masa depannya. Jika masalah kemiskinan ini dapat diselesaikan, dengan demikian kebutuhan kehidupan keseharian, dalam hal ini ialah kesehatan, kualitas pendidikan serta tempat hidup yang layak akan dapat diperoleh oleh semua masyarakat.

Kemiskinan ini timbul pada saat seorang individu ataupun kelompok individu tidak dapat memenuhi tingkatan kemakmuran ekonomi yang dianggapnya ialah sebagai standar hidup minimal. Penyebab kemiskinan ini berkenaan dengan beberapa fenomena, di antaranya ialah tidak produktif, tidak kreatif, pertumbuhan terhenti, gizi yang buruk, pendidikan yang rendah, serta pendapatan yang rendah, dengan demikian tingkatan pengangguran akan mengalami peningkatan serta pendapatan akan menurun. Berdasarkan pada uraian ini dijelaskan bahwa permasalahan kemiskinan ini hanya dalam beberapa hal tertentu, sampai pada

gilirannya akan menghasilkan keturunan yang akan sulit untuk keluar dari jurang kemiskinan ini.

Gambar 1. 1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Lingga 2022

Kabupaten Lingga memandang serius masalah kemiskinan ini dengan memasukkannya ke dalam RPJMD Kabupaten Lingga sebagai hal yang harus diperhatikan karena berdampak signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Kemudian Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) dimasukkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lingga di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan berfokus pada permasalahan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial. Hal ini menegaskan peranan dan posisi dari sektor kesejahteraan sosial di dalam konsistensi dari pembangunan nasional yang dimaksudkan agar dapat menaikkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta meminimalkan angka kemiskinan yang ada.

Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Riau memiliki 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 82 desa dengan jumlah

penduduk sekitar 98.633 jiwa. Kabupaten Lingga juga termasuk ke dalam salah satu kabupaten yang jumlah presentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dengan presentase 13,93%, disusul kemudian oleh Kota Tanjungpinang 9,57 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 7,09 persen. Kabupaten Natuna memiliki persentase penduduk miskin terkecil dengan 4,95 persen pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dari beberapa kabupaten dan kota yang berada di Kepulauan Riau. Yang mana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lingga pada Maret 2021 sebesar 12,58 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020, maka selama setahun tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13 persen (BPS, 2021).

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga



Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2022

Penurunan ataupun peningkatan untuk persentase penduduk yang miskin ini antara lain dipengaruhi dengan rendah atau tinggi dari kenaikan untuk garis kemiskinan. Ini fungsinya ialah sebagai batasan dalam mengelompokkan penduduk ke dalam golongan miskin ataupun golongan yang tidak miskin. Penduduk miskin ini ialah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita untuk per bulannya di

bawah garis kemiskinan. Mengacu pada uraian Gambar 1.1 menyebutkan bahwa perkembangan kemiskinan serta Garis Kemiskinan di Bulan Maret 2017 hingga Maret 2021.

Untuk periode bulan Maret 2017 - Maret 2021, menyebutkan bahwa Garis Kemiskinan mengalami kenaikan 2,48 persen, yakni yang mulanya Rp. 472.384,- per kapita per bulan di Maret 2020 kemudian menjadi Rp. 484.099,- per kapita per bulan di Maret 2021. Persentase untuk kenaikan ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan untuk Garis Kemiskinan untuk periode Maret 2019 - Maret 2020, yang mana bahwa kenaikannya ini ialah 9,92 persen atau dari Rp. 429.764,- per kapita per bulan di Maret 2019 kemudian menjadi Rp.472.384,- per kapita per bulan di Maret 2020. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa ada tingkatan kesejahteraan penduduk yang menurun yang terjadi di Kabupaten Lingga yang secara umum di Maret 2021 ini dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, dengan demikian jumlah penduduk dan persentase kemiskinan akan mengalami kenaikan.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lingga 2017- 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2017	12,35	13,84	395,089
2018	12,13	13,55	411,387
2019	11,56	12,88	429,764
2020	12,45	13,85	472,384
2021	12,58	13,93	484,099

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2022

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lingga adapun karakteristik masyarakat yang dikatakan miskin sabagai berikut: pertama memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak, kedua status pekerjaan kepala keluarga

sebagai buruh, pekerja bebas/serabutan, petani gurem, ketiga pendidikan anggota keluarganya rendah (misalnya SD/SMP kebawah), keempat kondisi perumahan yang kurang layak (misalnya dinding terluas selain tembok (plasteran, kayu/papan, anyaman bambu batang kayu, bamboo dan lainnya), jenis lantai terluas terbuat dari ubin/tegel/teraso, atau kayu/papan, semen/bata merah, bamboo, tanah atau lainnya, kelima bahan bakar untuk memasak minyak tanah/arang/briket, dan keenam tidak memiliki aset (misalnya tidak mempunyai AC, mobil, sepeda motor lebih dari 2, dll) dan dengan pendapatan kurang dari Rp535,547/bulan.

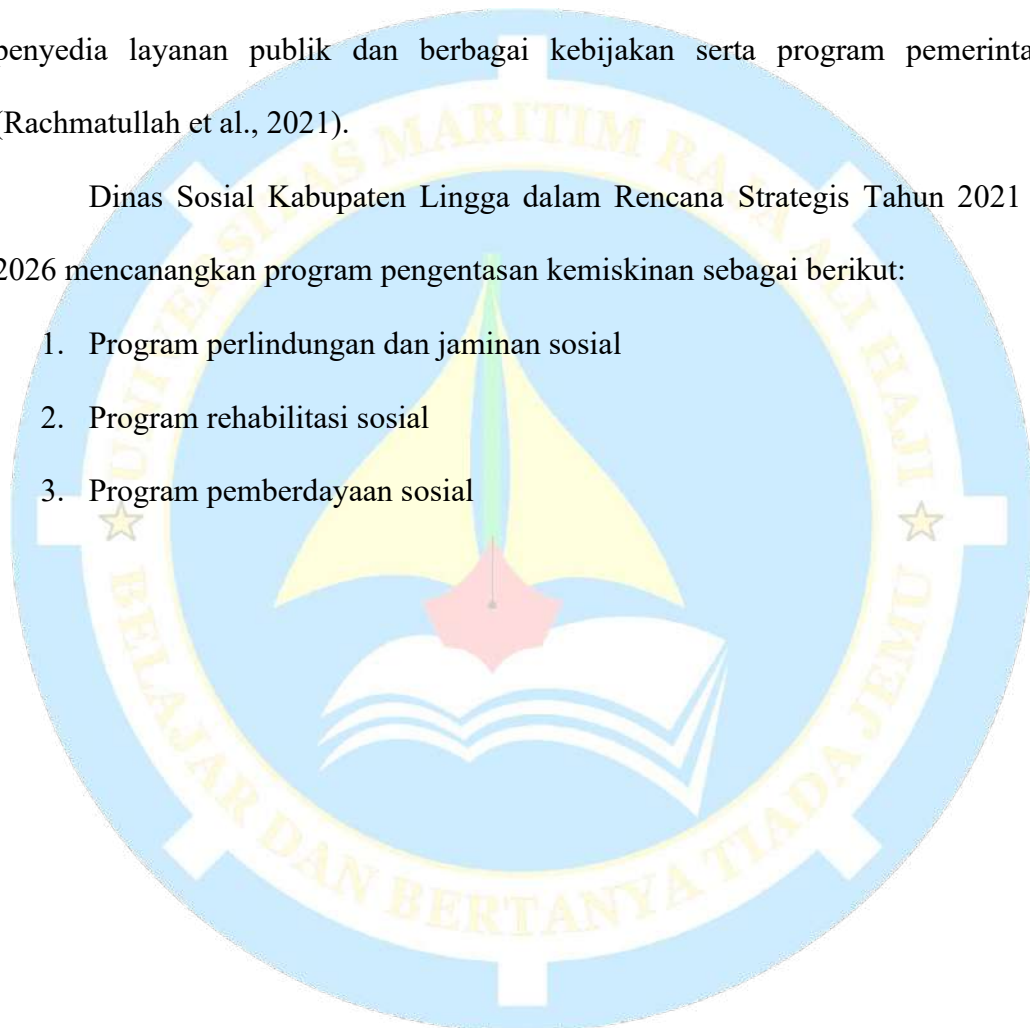
Penghapusan kemiskinan dalam tujuan SDG's ini ialah sebagai tujuan pokoknya. Berdasarkan tujuan ini dapat ditinjau bahwasannya Negara di dunia setuju bahwa kemiskinan ini wajib untuk dihapuskan. Selain itu, dalam hasil penelitian yang dilaksanakan Tri Santoso, menyebutkan bahwa pengentasan kemiskinan ini mempunyai keterkaitan hubungan dengan tujuan lainnya yang direncanakan dalam SDG's. Tujuan berikutnya ialah dunia tanpa kelaparan, menciptakan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan serta berbagai tujuan lain yang nantinya dituntaskan jika kemiskinan ini dapat dihilangkan atau diminimalkan. Membahas berkenaan dengan kemiskinan ini tentunya permasalahan klasik yang Negara Indonesia hadapi serta berupaya untuk diselesaikan oleh pihak Pemerintah Indonesia.

Tersediannya kewenangan daerah yang besar ini, dengan demikian pihak pemerintah daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan mempunyai keleluasaan serta pertanggungjawaban yang lebih tinggi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis dan penting berkenaan dengan upaya

untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut INFID (2016), mengungkapkan bahwa kesuksesan SDG's ini memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan peran penting dari pihak pemerintah daerah, hal ini dikarenakan bahwa pemerintah kota dan pemerintah kabupaten: (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah (Rachmatullah et al., 2021).

Dinas Sosial Kabupaten Lingga dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 mencanangkan program pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

1. Program perlindungan dan jaminan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program pemberdayaan sosial



Tabel 1. 2 Target Indikator Makro RPJMD Kabupaten Lingga

RPJMN 2020-2024					RPJMD Kabupaten Lingga					
Indikator Pembangunan	Target Kinerja				Indikator Pembangunan	Target Kinerja				
	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,4 – 5,7	5,7 – 6,0	6,0 – 6,3	6,2 – 6,5	Pertumbuhan Ekonomi	3,06	4,50	4,63	4,75	4,87
Tingkat Kemiskinan	9,43	9,00	8,55	8,15	Angka Kemiskinan	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,31	3,88	3,84	3,80	3,75
Indeks Pembangunan Manusia				74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia	65,69	65,89	66,09	66,29	66,49
Indeks Gini				0,360-0,474						
Penurunan Emisi GRK				27,3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,91	75,26	75,61	75,96	76,31

Sumber: RPJMD Kabupaten Lingga Tahun, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Lingga. Pemerintah Kabupaten Lingga memiliki Target yang harus dicapai. Bisa dilihat bahwa dalam indikator pembangunan salah satunya pada indikator angka kemiskinan target kinerja yaitu menurunkan angka kemiskinan yang sangat signifikan yang dimulai dari tahun 2021 – 2026.

Oleh karena itu untuk mengentas kasus kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga melalui program *Sustainable Development Goals* (SDG's) memiliki pekerjaan rumah dalam mengentas kemiskinan di daerah sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan. Kasus kemiskinan merupakan salah satu dari 17 program yang menjadi target pencapaian dalam SDG's. Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang telah saya jelaskan diatas maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Implementasi program Sustainable**

***Development Goals (SDG's)* dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lingga.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di bawah ini sebagai berikut yaitu mengapa pengentasan kemiskinan melalui program *Sustainable Development Goals (SDG's)* oleh Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lingga belum memenuhi atau menunjukkan keberhasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui implementasi program *Sustainable Development Goals (SDG's)* dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan studi perbandingan ilmu pengetahuan di bagian Ilmu Administrasi Negara bagi peneliti selanjutnya
- b. Penelitian ini bisa dipergunakan menjadi bahan studi pustaka peneliti, khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali haji
- c. Menambah wawasan peneliti serta menjadi bahan rekomendasi pemerintah Kabupaten Lingga.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Proposal ini merupakan wadah saran bagi penulis di harapkan mampu dalam mengembangkan Ilmu di bidang Ilmu Administrasi Negara dalam pengentasan kemiskinan melalui program SDG's di Kabupaten Lingga
- b. Bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji usulan tersebut diharapkan dapat menambah literatur pada Program Penelitian Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi Instansi terkait dan Instansi lain diharapkan proposal ini dapat memberikan kontribusi nyata melalui pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Lingga.

